

Donor Plasma Konvalesen



KR-Muchtar M

Petugas PMI Banjarnegara melayani pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin Matrianom yang donor plasma konvalesen.

BANJARNEGARA (KR) - Keluarga besar pondok pesantren Tanbihul Ghofilin Matrianom Banjarnegara dan Rumah Sakit Islam (RSI) Banjarnegara, Selasa (3/8), menggelar donor plasma konvalesen untuk membantu penyembuhan pasien Covid-19. Santri pondok pesantren yang tergabung dalam Santri Gayeng Nusantara (SGN) itu, juga telah mengirimkan belasan pendonor ke PMI Banyumas dan menjalin komunikasi dengan PMI Banjarnegara. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin, M Chamzah Hasan, aksi ini sebagai kampanye agar para penyintas di Banjarnegara mendonorkan plasma untuk membantu penyembuhan pasien Covid-19. Para santri Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin juga telah diskroning awal dan para santri yang pernah terpapar Covid-19 dipersiapkan donor plasma konvalesen. **(Mad)**

CASN DAN PPPKA DI SUKOHARJO
1.148 Pendaftar Tidak Lolos

SUKOHARJO (KR) - Sebanyak 1.148 orang dari total 8.201 orang pendaftar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non-guru Pemkab Sukoharjo dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Hal tersebut diketahui setelah panitia rekrutmen CASN dan PPPK Pemkab Sukoharjo selesai melakukan seleksi. Namun mereka masih bisa mengajukan sanggahan pada 4-6 Agustus melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo, Sumini mengatakan, Panitia Tekrutmen CASN dan PPPK Pemkab Sukoharjo menerima total pendaftar 9.985 orang. Khusus PPPK guru, seleksi administrasi ditangani langsung pemerintah pusat melalui Kemendikbud. "Ada 1.783 pendaftar PPPK Guru yang proses seleksi administrasinya ditangani Kemendikbud. Panitia Rekrutmen Pemkab Sukoharjo hanya mendapat tugas seleksi administrasi untuk pendaftar CASN dan PPPK non-guru," jelas Sumini, Rabu (4/8). **(Mam)**

HUKUM

3 TAHUN MENCARI KEADILAN PENDIDIKAN
Pindah Sekolah dengan Rekomendasi

SLEMAN (KR) - Proses kepindahan Adl (17) dari Sekolah Internasional, Yogyakarta Independent School (YIS) ke Olifant School (sekolah nasional) tidaklah mudah. Adl diterima masuk di Olifant dengan status *Emergency Rescue*, yaitu tindakan penyelamatan pendidikan dimana permasalahan persyaratan akademis diabaikan. Rekomendasi kemudian diberikan Kantor Dinas Pendidikan DIY.

Sebelumnya Adl dikeluarkan oleh YIS 24 Agustus 2018 terkait permasalahan orangtuanya, Erika Hendriati (51) yang melaporkan YIS dengan dugaan pemalsuan nilai di ijazah Adl. "Bisa diterima di Olifant, anak saya juga harus menjalani assessment untuk menyesuaikan tingkat akademis anak dengan kurikulum nasional. Terutama beberapa mata pelajaran yang selama bersekolah di YIS tidak pernah diajarkan," ucap Erika, Rabu (4/8).

Erika membantah pernyataan Odie Hudyanto SH selaku penasihat hukum terdakwa Bendahara YIS, Sup (40), yang dalam eksepinya Selasa (3/8) di PN Sleman menyebutkan ijazah yang dikeluarkan YIS untuk Adl sudah sah dan legal dengan bukti Adl bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

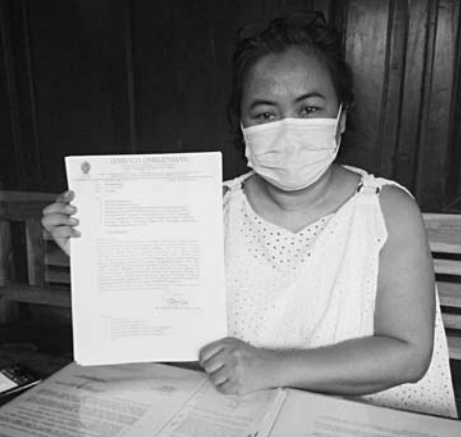
"Saat perpindahan sekolah dari YIS, Adl tanpa dibekali kelengkapan akademis seperti konversi nilai rapor ke dalam nilai raport nasional dan data pokok pendidikan siswa (dapodik) hingga saya harus berkonsultasi ke Dewan Pendidikan Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman DIY. Saat rapat dengar pendapat dengan Dewan Pendidikan, disana saya mendapatkan pernyataan dari Pak Didik Wardaya, Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi Disdikpora DIY untuk menolong Adl melanjutkan sekolah secepatnya," tegas Erika.

Mengenai kronologi, Erika menyebutkan awalnya keluarganya tinggal di Muskat Oman. Tahun 2013 pindah ke Yogya dan ia memilih YIS karena promosi YIS sebagai sekolah internasional berkurikulum internasional, disamping karena anaknya belum bisa berbahasa Indonesia. Adl masuk Kelas 4 SD dengan membayar Rp 87 juta dan terakhir saat dikeluarkan uang sekolah YIS sekitar Rp 130 juta.

"Sejak awal bersekolah saya sudah menjumpai berbagai kejanggalan, salah

satunya pihak sekolah tidak transparan soal uang tahunan. Saya dan orangtua siswa lainnya juga telah menanyakan kepada Kepala Sekolah tentang komponen pembiayaan hingga jumlah yang dibebankan mencapai lebih dari Rp 100 juta, namun tak pernah mendapatkan jawaban. Sementara uang tahunan untuk siswa lama dan siswa baru sama. Lalu siapa yang tidak membayar uang pangkal atau uang Gedung. Sekolah juga kerap memberikan diskon hingga 20 persen dari seluruh jumlah uang tahunan. Saya bertanya, diskon-diskon itu diambil dari alokasi biaya apa? Tapi Kepala sekolah malah minta saya bertanya pada Yayasan," jelas Erika

Puncaknya, tahun 2018 saat anaknya menerima ijazah kelulusan bangku kelas 6 (setingkat SD). "Seharunya ijazah diperoleh Adl saat lulus 2016, namun baru diterima dua tahun kemudian, itupun karena kami memintanya," ungkapnya. Saat menerima ijazah itulah Erika menemukan dua nilai mata pelajaran yang tidak pernah diajarkan yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan masing-masing nilai 75. Hingga melapor ke Polsek Mlati pada 1 Agustus 2018. Permasalahannya ini juga diadukan ke Kemendikbud dan Lembaga Ombudsman (LO) DIY dan pernah diupayakan mediasi pada tanggal 31 Juli 2018. **(Vin)**



KR-Juvintarto

Erika menunjukan berkas persyaratan agar anaknya bisa diterima di Olifant School setelah dikeluarkan dari YIS.

PENYEBAB DROPING VAKSIN COVID-19 KACAU

Data yang Diinput Tidak Sinkron

GROBOGAN (KR) - Kacaunya data vaksin yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Grobogan, akhirnya ditemukan penyebabnya. Yaitu karena daerah melakukan penginputan data vaksin melalui aplikasi Pcare.

Sedangkan Kementerian Kesehatan RI melihat data ketersediaan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan data vaksin di aplikasi Smile.

"Berarti ada ketidak-sinkronnya data yang diinput petugas usai pelaksanaan vaksinasi ke aplikasi Pcare. Sementara itu Kementerian Kesehatan RI melihat data ketersediaan vaksinasi berdasarkan data vaksin di aplikasi Smile. Ini biang keladinya," ujar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di sela kunjungan kerja di Desa Wolo Kecamatan Penawangan Grobogan, Selasa (3/8).

Awalnya Ganjar melihat petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sedang menginput data vaksin melalui aplikasi Pcare setelah ada warga yang selesai divaksinasi. Kemudian data tersebut

baru dilanjutkan dengan aplikasi Smile. "Kenapa tidak ke Smile? Pusat melihatnya pakai itu," ungkanya.

Oleh Kepala Dinas Grobogan Slamet Widodo dijawab, penginputan data memang lebih dulu dilakukan lewat aplikasi Pcare.

Setelah diinput melalui Pcare, baru diinput ke aplikasi Smile. Alasannya, penginputan dua langkah itu, lantaran penginputan ke aplikasi Smile memakan waktu lama.

"Kalau sudah bisa langsung input ke aplikasi Pcare, kami juga siap melaksanakan vaksinasi setiap hari," tegasnya.

Menurut Gubernur, pihaknya akan meluruskan cara pengimputan tersebut, karena selama ini hampir seluruh kabupaten/kota mengeluhkan ke-

terlambatan distribusi vaksin Covid-19 dari pusat. "Saya akan segera melakukan evaluasi dengan Dinkes Provinsi Jateng," tandasnya. **(Tas)**



KR-M TASLIM

Ganjar Pranowo mengamati inpput data vaksin di Desa Wolo Grobogan.

UNDIAN SIMPEDES BRI WONOSOBO

Intarti Raih Hadiah Utama Mobil

WONOSOBO (KR) - Hadiah utama mobil Honda BR-V S MT Tabungan Simpedes BRI Periode II 2020 berhasil Intarti dari nasabah BRI Unit Wadastintang Kabupaten Wonosobo. Penyerahan hadiah secara simbolis dilakukan

oleh Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Wonosobo Chistison Tumbur Simanjuntak kepada perwakilan nasabah, Rabu (4/8) di Kantor BRI Cabang Wonosobo. Berbeda dengan acara pengundian Simpedes sebelumnya yang selalu di-

meriahkan dengan pesta hiburan, kali ini proses pengundian dilaksanakan secara virtual melalui Zoom maupun Live Streaming Instagram Wonosobo-Zone. Pengundian juga berangsur dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona.

Dalam pengundian BRI Simpedes kali ini juga dibagikan berbagai hadiah menarik dengan total hadiah mencapai Rp 635,33 juta.

Selain hadiah grand prize mobil Honda BR-V S MT, juga diundi hadiah utama 2 unit sepeda motor Yamaha Lexi dan 21 sepeda motor Honda Beat Sporty CBS, serta hadiah hiburan 22 televisi LED Aqua 32 inci dan berbagai hadiah hi-

buran lainnya.

Christison Tumbur Simanjuntak mengungkapkan bahwa pihaknya berkeinginan untuk turut serta mengembangkan sektor perekonomian di Wonosobo. Di antaranya memberikan kredit kategori produktif maupun konsumtif untuk para pengusaha dan masyarakat luas. Berdasarkan data per 31 Juli 2021, BRI Cabang Wonosobo mampu menghimpun dana masyarakat dari Tabungan Simpedes lebih dari Rp 817 miliar dengan jumlah rekening 410.336 nasabah.

Penyaluran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) mencapai Rp 362 miliar dengan jumlah debitur 10.243 orang. Penyaluran

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Baru mencapai Rp 570 miliar dengan jumlah debitur 33.848 orang. "Dengan demikian, Kredit Usaha Mikro yang telah disalurkan BRI Cabang Wonosobo Rp 932 miliar dengan jumlah debitur 44.091 orang," jelas Christison.

Menurutnya, nuntuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Cabang BRI Wonosobo juga telah memiliki sedikitnya 19 kantor unit, 2 kantor teras, 24 ATM, 16 CRM, serta Elektronik Data Capture (EDC) yang telah terpasang di merchant-merchant di Wonosobo, guna memudahkan para nasabah dan mitra kerja untuk bertansaksi. **(Art)**

MENGAKU DAPAT CAIRKAN PINJAMAN DI BANK

Ibu Dua Anak 'Sukses' Lakukan Penipuan

SLEMAN (KR) - Penipuan dengan modus dapat mencairkan pinjaman dana di bank hingga miliaran rupiah, terjadi di wilayah Berbah Sleman. Dengan modus tersebut, seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Tegal berinisial NP (33) menipu sejumlah orang sehingga meraup untung diduga hingga ratusan juta rupiah.

Kapolsek Berbah Kompol Eko Wahyu didampingi Kanit Reskrim Iptu Isnaini, Selasa (4/8), menjelaskan salah satu korban adalah N warga Berbah Sleman. Kepada korban, pelaku menjanjikan dapat membantu mencari pinjaman kredit di bank tanpa agunan sebesar Rp 1 miliar. "Pelaku memberi syarat, yakni korban harus membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. Tanpa curiga, korban yang saat itu memang sedang membutuhkan uang untuk mengembangkan usaha, langsung menerima tawaran pelaku," ungkap Kapolsek.

Korban menyerahkan uang secara tunai yang dibayar bertahap, sehingga total yang dikeluarkan sebesar Rp 39,2 juta. Uang itu, diberikan kepada pelaku kurun waktu 14 Agus-

tus 2020 hingga Mei 2021. Namun saat waktu yang dijanjikan, pinjaman di sebuah bank swasta seperti yang dijanjikan oleh pelaku, tidak cair. Bahkan pelaku yang merupakan ibu dari dua anak ini juga sulit dihubungi, sehingga korban melaporkannya ke Mapolsek Berbah.

Iptu Isnaini, kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku saat berada di daerah Seturan Depok Sleman. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya sehingga langsung dibawa ke Mapolsek Berbah untuk di mintai keterangan dan di proses lebih lanjut.

"Statusnya sudah tersangka dan ditahan atas pelanggaran Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP. Penahanan tersangka yang tinggal di wilayah Kalasan

Sleman ini kami titipkan di Mapolres Sleman. Barang bukti yang kami sita berupa satu lembar kwitansi bertandatangan tersangka dan enam lembar fotokopi chatngan antara tersangka dengan korban," tandasnya.

Kanit Reskrim menambahkan, hasil pemeriksaan

terhadap tersangka, ternyata korban tidak hanya satu orang. Bahkan ada yang berasal dari Tegal, daerah asal tersangka. "Ada sekitar tujuh hingga delapan orang yang diduga jadi korban tersangka, namun sebagian belum melapor. Tersangka mengaku melakukan aksinya karena terdesak kebutuhan hidup. Uang hasil tidak pidana diakui oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, apalagi suaminya tak punya pekerjaan," pungkas Isnaini. **(Ayu)**



KR-Dok Polsek Berbah

Tersangka NP kini dititipkan di Mapolres Sleman.

PATOK HARGA PTSL RP 1,5 JUTA

Mantan Lurah Banyutowo Ditahan

KENDAL (KR) - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah untuk masyarakat mendapatkan sertifikat. Meski mendapatkan kemudahan, tapi ternyata banyak dimanfaatkan oleh pengambil keputusan di tingkat desa atau kelurahan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal, program PTSL yang bermaksud membantu membuat sertifikat sebanyak 600 bidang disalahgunakan oleh Lurah saat itu dan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Kasi Pidsus Kejari Kendal, Dani K Daulay, Rabu (4/8), mengatakan telah terjadi pengelembungan biaya

PTSL yang seharusnya Rp 150.000 menjadi Rp 1,1 juta untuk sertifikat tanah daratan dan Rp 1,5 juta untuk sertifikat tanah persawahan.

Penentuan harga dilakukan oleh mantan Lurah Banyutowo berinisial IS dan Ketua Pokmas berinisial SS, tanpa ada pembicaraan dengan warga yang akan mengikuti program PTSL. Penentuan besarnya biaya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan program yaitu tahun 2017 sementara program PTSL dijalankan tahun 2018.

"Sudah ada ketentuan bahwa patokan harga yang diizinkan sebesar Rp 150 ribu, bisa lebih tapi harus ada kesepakatan dengan warga yang

mengajukan sertifikat lewat PTSL. Tapi yang terjadi di Kelurahan Banyutowo Kendal tidak demikian, sebelum pendaftaran harga sudah ditetapkan dan ini menyalahi aturan," ujar Danny.

IS dengan beberapa anggota Pokmas melakukan tahapan sosialisasi hingga realisasi namun tidak membahas biaya karena sebelumnya sudah ditetapkan. Dari rangkain tahapan tersebut sejumlah warga yang ikut program kemudian menanyakan kepada Lurah dan Ketua Pokmas, namun tidak dijelaskan dan membuat warga melaporkan kejadian ke Kejaksaan. **(Ung)**